

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ainun Azisah
NPP.32.0875

Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: nurazisah88x@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): There are still cases of work accidents at the Bone Regency Regional Disaster Management Agency which has a high level of risk in its operations.

Purpose: This study aims to determine how the implementation of K3 is at the Bone Regency Regional Disaster Management Agency. **Method:** The method used in this study is a qualitative method with a descriptive and inductive approach. This approach was chosen to describe in depth the real conditions of the implementation of Occupational Safety and Health (K3) at the Bone Regency BPBD based on data obtained from interviews, observations, and documentation. **Result:** The study shows that the implementation of K3 at the Bone Regency BPBD has not been running optimally. The main inhibiting factors include limited supporting facilities and infrastructure, lack of employee awareness of the importance of K3 and limited budget allocation for K3 programs. **Conclusion:** The indicators for the implementation of Occupational Safety and Health (K3) that have not been met are more than the indicators that have been implemented, resulting in the risk of work accidents and work-related diseases at the Bone Regency BPBD still being relatively high.

Keywords: *Occupational Safety and Health, Work Accident, WorkRisk*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih terjadinya kasus kecelakaan kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam operasionalnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam kondisi nyata penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BPBD Kabupaten Bone berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di BPBD Kabupaten Bone belum berjalan optimal. Faktor penghambat utamanya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya

kesadaran pegawai terhadap pentingnya K3 serta terbatasnya alokasi anggaran untuk program-program K3. **Kesimpulan:** Indikator penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum terpenuhi lebih banyak dibandingkan dengan indikator yang telah diterapkan, sehingga menyebabkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada BPBD Kabupaten Bone masih tergolong tinggi.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Risiko Kerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya masing-masing dan semua tenaga kerja berisiko mengalami kecelakaan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya penting dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif. K3 tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas kerja pegawai yang menjadi salah satu produk dari Reformasi Birokrasi (Madjid, 2020). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat sebanyak 173.415 kasus kecelakaan kerja, angka ini mengalami kenaikan sebesar 5,43% menjadi 182.835 kasus pada tahun 2019 dan meningkat lagi sebesar 21,28% hingga mencapai 221.740 kasus pada tahun 2020. Meski pertumbuhan angka menurun pada tahun 2021 tetapi masih tercatat peningkatan sebesar 5,65% dengan total 234.270 kasus. Kemudian meningkat lagi sebesar 27,8% menjadi 297.725 kasus pada tahun 2022. Data terakhir pada tahun 2023 hingga November, total kecelakaan mengalami peningkatan mencapai 360.635 kasus kecelakaan kerja (Syaharani, 2023).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi yang memiliki tingkat risiko kerja yang sangat tinggi karena pegawainya sering terlibat langsung dalam situasi darurat dan bencana. Lingkup pekerjaan yang berat dan berisiko tinggi menuntut perhatian khusus terhadap keselamatan kerja. Namun di BPBD Kabupaten Bone, penerapan K3 belum berjalan dengan baik. Berdasarkan data internal BPBD Kabupaten Bone tahun 2023, tercatat adanya beberapa kejadian kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan ringan akibat kelalaian penggunaan alat pelindung diri (APD) dan cedera saat bertugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator K3 yang belum terpenuhi secara maksimal.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan serta rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya penerapan K3. Rendahnya penerapan K3 ini dapat berdampak serius terhadap keselamatan pegawai dan keberhasilan tugas penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana penerapan K3 di BPBD Kabupaten Bone, apa saja kendalanya serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja pegawai.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki peranan penting dalam mendukung keselamatan pegawai, terutama di lingkungan kerja yang penuh risiko seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penerapan K3 Kabupaten Bone belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kendala yang masih menjadi persoalan mendasar, seperti terbatasnya anggaran yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) dan fasilitas pendukung lainnya. Tingkat kesadaran pegawai terhadap pentingnya keselamatan kerja masih relatif rendah. Beberapa pegawai cenderung mengabaikan penggunaan APD karena merasa kurang nyaman atau menganggapnya tidak terlalu penting. Padahal, mereka bekerja dalam situasi yang cukup rawan terhadap risiko kecelakaan kerja. Sikap saling mengingatkan antarpegawai juga belum terbentuk sebagai bagian dari budaya kerja yang menjunjung tinggi

keselamatan. Masalah lain yang turut memperkuat lemahnya penerapan K3 adalah tidak adanya sistem pelaporan yang terstruktur mengenai kejadian kecelakaan kerja, sehingga insiden yang terjadi sering kali dianggap sepele dan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa K3 masih dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai kebutuhan utama dalam mendukung keselamatan dan efektivitas kerja. Konteks BPBD Kabupaten Bone yang memiliki tugas berat dan penuh risiko di lapangan, seharusnya penerapan K3 menjadi perhatian utama dan dijalankan secara sistematis serta berkelanjutan. Namun kenyataannya, hal ini belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi tersebut menjadi alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Belum adanya kajian mendalam yang mengungkap bagaimana penerapan K3 dijalankan dalam lingkup kerja BPBD Kabupaten Bone menimbulkan celah pengetahuan yang perlu diisi. Menggambarkan situasi aktual, kendala dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem K3 di lingkungan BPBD serta mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih aman dan bertanggung jawab.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam berbagai lingkungan kerja telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang beragam. (Muniasari, 2021) menelaah efektivitas penerapan ergonomi perkantoran di PT Coda Integra Internusa. Penelitian tersebut mengungkap bahwa penerapan K3 berbasis ergonomi telah cukup efektif melalui indikator ketetapan sasaran, sosialisasi dan pemantauan, meskipun masih terdapat tantangan terkait gangguan otot dan tulang akibat postur kerja yang tidak sesuai. Faktor lingkungan seperti pencahayaan, suhu dan tata letak ruang menjadi komponen penting yang memengaruhi efektivitas ergonomi. Sementara itu, (Makhroja, 2023) melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen K3 di RSUD dr. R. Soedjono Selong. Ditemukan bahwa meskipun kebijakan dan komitmen formal telah ada, pelaksanaannya masih belum optimal akibat variasi latar belakang pendidikan tenaga kerja dan penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai. Adapun (Wahdania, 2021) mengkaji penerapan sistem manajemen K3 di PT Indonesia Power PLTU Barru, yang menghadapi berbagai potensi bahaya seperti debu batu bara, kebisingan hingga sengatan listrik. Pengamatan langsung digunakan sebagai metode untuk mengevaluasi penerapan kebijakan dan rencana K3. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Wahdania terletak pada fokus terhadap perlindungan karyawan dan penyediaan sarana pendukung K3. (Shahibah, 2012) meneliti pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan double-double track kereta api jalur Jatinegara–Manggarai. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi, pelaksanaan K3 di lapangan masih belum optimal dan menimbulkan berbagai insiden kecelakaan kerja. Dengan metode observasi deskriptif, penelitian ini memiliki irisan dengan penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam penggunaan pendekatan kualitatif serta perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja dan penyediaan sarana K3. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Alimuddin, 2010) dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RSUD Tarakan Tahun 2010 menunjukkan bahwa komitmen dan kebijakan pimpinan rumah sakit terhadap penerapan K3 sudah ada dan tertuang secara tertulis. Namun, kebijakan tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh elemen di RSUD Tarakan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Firman Alimudin terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu terkait keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan jenis penelitian yang serupa. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian yang berbeda, variasi dalam daftar pertanyaan wawancara serta perbedaan narasumber yang diwawancarai. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam konsep yang digunakan serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun penelitian lainnya yaitu Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Amri,

n.d.) dengan judul Hubungan antara Faktor Penghambat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 (Studi di RSUD Balung Kabupaten Jember) pada tahun 2007. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Tatag terletak pada kesamaan topik, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan wawancara, sementara penelitian Tatag menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah karena membahas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada organisasi tanggap darurat yang menghadapi tantangan serupa dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, minimalnya pelatihan teknis serta kurangnya budaya keselamatan yang mengakar pada personel lapangan (Smith, 2021). Tidak hanya menyoroti aspek K3 di lapangan saat penanggulangan bencana, penelitian ini juga mencakup risiko kerja yang dihadapi oleh pegawai di lingkungan kantor, seperti kelelahan, beban kerja tinggi dan kondisi fasilitas yang belum mendukung prinsip-prinsip K3 secara optimal. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Muniasari, 2021) yang meneliti sektor industri manufaktur dan Nanda (Wahdania, 2021) yang fokus pada proyek konstruksi, belum menjangkau ruang lingkup pemerintahan daerah yang memiliki fungsi strategis dan tanggung jawab kemanusiaan di bawah tekanan seperti BPBD. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggali perspektif langsung dari para pelaksana di lapangan maupun di kantor serta analisis indikator yang digunakan mengacu pada teori (Mangkunegara, 2016) yang membedakan secara jelas antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dengan demikian penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai penerapan K3 di sektor publik, khususnya pada instansi pemerintah yang bekerja dalam kondisi darurat dan juga menghadapi risiko kerja administratif di lingkungan kantor yang belum banyak dikaji.

organisasi tanggap darurat yang menghadapi tantangan serupa dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, minimalnya pelatihan teknis, serta kurangnya budaya keselamatan yang mengakar pada personel lapangan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bone dalam menangani permasalahan terkait kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh para pegawainya.

II. METODE

Penelitian ini melakukan pendekatan penelitian mencakup tahapan yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan argumen yang komprehensif, serta metode yang terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif (Creswell, W, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Serta penulis menggunakan sumber data primer yang dapat memberikan jawaban hasil dari wawancara informan (Simangunsong, 2017). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan K3 baik di lapangan maupun di lingkungan kantor. Observasi dilakukan untuk melihat langsung penerapan K3 dan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori K3 dari (Mangkunegara, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada BPBD Kabupaten Bone menggunakan teori (Mangkunegara, 2016) yang menekankan pentingnya kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pegawai. Analisis ini mencakup penerapan K3 tidak hanya di lapangan tetapi juga di kantor dengan fokus pada beberapa dimensi, yaitu lingkungan kerja yang aman, suhu udara yang nyaman, penerangan yang memadai, penggunaan peralatan kerja yang tepat serta pemeliharaan kondisi fisik dan kesehatan pegawai. Pembahasan lebih lanjut disajikan pada subbab berikut.

3.1 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan, kenyamanan dan produktivitas pegawai. Penataan ruang yang baik serta kebersihan yang terjaga dapat mencegah risiko kecelakaan dan gangguan dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, yaitu Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kasubag Program BPBD Kabupaten Bone, diketahui bahwa lingkungan kerja di kantor secara umum telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjaga kebersihan. Setiap ruangan telah dilengkapi tempat sampah, sabun cuci tangan dan penataan tempat duduk disesuaikan dengan jumlah pegawai agar tidak terlalu padat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin), khususnya pada aspek Resik (bersih) dan Ringkas (tidak menumpuk barang yang tidak perlu) (Consultant, 2024).

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan prinsip 5R secara menyeluruh, terutama pada aspek Rapi dan Rawat. Beberapa ruangan masih tampak berantakan karena kurangnya tempat penyimpanan berkas serta adanya penumpukan barang di sudut ruangan yang mengganggu ruang gerak. Selain itu, kabel-kabel listrik yang tidak tertata dengan baik dan dibiarkan terbuka di lantai berpotensi membahayakan keselamatan, seperti risiko tersandung, kesetrum, hingga korsleting listrik (Yuliandi, C. D., & Ahman, 2019). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan perhatian lebih dalam penerapan prinsip 5R secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, tertata dan mendukung produktivitas pegawai.

3.2 Suhu Udara

Suhu udara merupakan faktor penting dalam menciptakan kenyamanan dan produktivitas pegawai di lingkungan kerja. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat memengaruhi kondisi fisik pegawai, seperti kelelahan, dehidrasi, hingga menurunnya konsentrasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja. Berdasarkan

Permenaker No. 5 Tahun 2018, suhu ideal untuk ruang kerja berada pada kisaran 20°C hingga 26°C.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di BPBD Kabupaten Bone, suhu ruangan di kantor telah diperhatikan dengan cukup baik. Ruang-ruang operasional utama telah dilengkapi dengan pendingin udara (AC), sementara ruang lainnya menggunakan kipas angin serta memiliki ventilasi yang memadai di bagian atas dinding untuk menunjang sirkulasi udara. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan terasa sejuk dan nyaman untuk bekerja. Ventilasi alami dan jendela yang terbuka turut membantu menjaga suhu tetap stabil, meskipun di beberapa ruangan tanpa AC, suhu bisa sedikit meningkat saat cuaca luar sangat panas. Secara umum, suhu di lingkungan kantor masih berada dalam kategori nyaman dan tidak mengganggu aktivitas kerja. Hal ini sejalan dengan teori (Mangkunegara, 2016) yang menyatakan bahwa suhu kerja yang ideal dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

3.3 Penerangan

Penerapan K3 di setiap tempat kerja memiliki peranan yang sangat penting, mengingat keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh tenaga kerja di perusahaan atau tempat kerja tersebut (Suma'mur, 2001). Penerangan yang baik sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai, terutama untuk mencegah kelelahan mata, gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja yang bisa terjadi akibat pencahayaan yang buruk. Menurut (Haworth & Hughes, 2012) dan Permenaker No. 5 Tahun 2018, pencahayaan yang ideal harus cukup terang tanpa menyebabkan silau serta harus merata di seluruh area kerja.

Hasil wawancara dengan pejabat BPBD Kabupaten Bone menunjukkan bahwa penerangan di kantor sudah diatur dengan cukup baik. Beberapa ruangan memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela besar yang memungkinkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Selain itu, sebagian besar ruangan dilengkapi dengan lampu yang dipasang dengan mempertimbangkan arah dan kebutuhan cahaya. Penggunaan tirai juga dilakukan untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk sehingga tidak mengganggu kenyamanan pegawai. Berdasarkan observasi dilakukan, Peneliti mendapati bahwa pencahayaan di dalam ruangan terasa cukup terang dan merata dengan pencahayaan alami yang sangat terasa di siang hari serta merasakan kenyamanan dalam melakukan tugas di ruang yang terang, yang tentunya mendukung produktivitas dan fokus dalam bekerja. Hal ini juga sesuai dengan teori (Mangkunegara, 2016), yang menyatakan bahwa pencahayaan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan visual dan mengurangi potensi kecelakaan kerja.

3.4 Pemakaian Peralatan Kerja

Pemakaian peralatan kerja yang sesuai standar sangat penting dalam memastikan keselamatan pegawai. Alat yang rusak atau tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, sementara penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai juga dapat menambah potensi bahaya. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penggunaan alat kerja yang sesuai dengan standar keselamatan adalah hal yang esensial dalam penerapan K3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait, diketahui bahwa BPBD telah menyediakan gudang penyimpanan dan peralatan pelindung, namun kesadaran pegawai dalam penggunaan APD masih rendah. Beberapa pegawai merasa APD mengganggu pergerakan. Peralatan seperti genset masih diservis jika memungkinkan, sedangkan alat seperti hazmat diganti setiap kali digunakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian

alat sudah tertata rapi, namun pemakaian APD belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 dalam aspek penggunaan peralatan kerja belum optimal. Meskipun penyediaan alat sudah cukup memadai, diperlukan peningkatan kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam penggunaannya, sesuai Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010 dan teori (Mangkunegara, 2016).

3.5 Kondisi Pegawai

Kondisi fisik dan mental pegawai merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kesehatan pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik seperti suhu, pencahayaan dan kebersihan, tetapi juga oleh faktor psikososial seperti suasana kerja, hubungan antarpegawai dan perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan bawahannya. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan jasmani dan psikologis akan berdampak positif terhadap kinerja, motivasi dan loyalitas pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di BPBD Kabupaten Bone, diketahui bahwa pimpinan rutin mengadakan kegiatan fisik seperti senam pagi dan kerja bakti yang dilakukan secara bergiliran setiap minggunya. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang lebih santai, meningkatkan kekompakan antarsesama pegawai serta menjaga kebersihan lingkungan kantor. Pimpinan juga membuka ruang komunikasi bagi pegawai untuk menyampaikan keluhan atau usulan terkait pekerjaan, sehingga menciptakan hubungan kerja yang terbuka dan saling menghargai. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan seperti senam bersama dan kerja bakti benar-benar dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh pegawai. Suasana kantor tampak tertata rapi dan bersih dan interaksi antarpegawai berlangsung akrab dan tidak kaku. Pegawai terlihat aktif dan antusias dalam mengikuti aktivitas, yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja di BPBD Kabupaten Bone mendukung aspek kesehatan dan kenyamanan kerja. Hal ini sejalan dengan teori (Mangkunegara, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perhatian terhadap keseimbangan fisik dan mental pekerja melalui kegiatan positif yang meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

3.6 Faktor Penghambat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berbagai hambatan kerap kali menjadi tantangan dalam implementasinya. Hal ini juga terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, penulis menemukan sejumlah kendala yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat penerapan K3 secara optimal. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan minimnya dukungan terhadap kebutuhan dasar penerapan K3 seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan kerja serta pemeliharaan sarana keselamatan. Ketiadaan anggaran yang mencukupi membuat pelaksanaan K3 belum berjalan sesuai standar yang diharapkan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti keterbatasan jumlah alat pemadam kebakaran yang tersedia. Kondisi ini menyulitkan BPBD dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, terutama mengingat karakteristik pekerjaan yang penuh risiko.
3. Minimnya ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang belum sebanding dengan kebutuhan ruangan dan fungsi operasional gedung. Hal ini berpotensi menurunkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya kebakaran secara cepat dan tepat.
4. Rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya keselamatan kerja, yang disebabkan oleh terbatasnya pelatihan dan penyuluhan mengenai K3. Kurangnya pemahaman ini

membuat sebagian pegawai cenderung mengabaikan penggunaan APD serta prosedur keselamatan lainnya.

5. Lemahnya sistem pengawasan internal, baik dari atasan maupun antarpegawai. Ketidakkonsistenan dalam pengawasan berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, sehingga risiko kecelakaan kerja tetap tinggi.

3.7 Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dalam Mengatasi Kendala pada Penerapan K3

Menyadari berbagai hambatan yang mengganggu penerapan K3, BPBD Kabupaten Bone telah merumuskan sejumlah langkah strategis sebagai bentuk upaya perbaikan. Upaya-upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung kinerja pegawai dalam situasi darurat maupun kegiatan rutin. Adapun langkah-langkah yang telah dan sedang diupayakan antara lain:

1. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana pendukung K3 ke dalam rencana pengadaan jangka menengah dan panjang. Langkah ini dilakukan agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai standar keselamatan kerja yang memadai.
2. Melakukan evaluasi kelayakan sarana dan peralatan kerja guna mengidentifikasi kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai. Hasil peninjauan digunakan sebagai dasar untuk penghapusan atau penggantian fasilitas yang membahayakan keselamatan kerja.
3. Melaksanakan sosialisasi rutin terkait penggunaan alat dan prosedur keselamatan kerja, yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan kerja aman dan membangun budaya sadar K3 di lingkungan organisasi.
4. Memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam penerapan K3, baik melalui pengawasan langsung oleh pimpinan maupun secara horizontal antarpegawai. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keselamatan di tempat kerja.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone memberikan dampak positif terhadap seluruh pegawai, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Aspek-aspek K3 seperti pengaturan suhu ruangan dengan AC dan ventilasi yang baik, pencahayaan yang optimal serta kegiatan rutin seperti olahraga dan kerja bakti terbukti berkontribusi dalam menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai. Hal ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas, tetapi juga secara langsung berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang dapat berdampak fatal, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Temuan ini memperkuat teori (Mangkunegara, 2016) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang sehat, aman dan tertata secara ergonomis merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan perlindungan bagi tenaga kerja, terutama di lembaga yang memiliki risiko tinggi seperti BPBD.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerapan K3, terutama dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pengawasan kerja. Beberapa kecelakaan kerja ringan masih terjadi karena kelalaian individu dan kurangnya pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan K3 secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pemerintah yang memiliki anggaran terbatas dan birokrasi yang panjang mempengaruhi kecepatan dan kelengkapan implementasi program K3. Namun, keterbatasan ini justru mendorong adanya kemauan dari pegawai untuk saling mengingatkan, berinisiatif menggunakan peralatan keselamatan yang tersedia dan lebih peduli terhadap

keselamatan diri maupun rekan kerja, yang mengindikasikan tumbuhnya kesadaran internal akan pentingnya budaya kerja yang selamat dan sehat.

Penerapan K3 di BPBD Kabupaten Bone diharapkan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tetapi mampu berkembang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi yang terinternalisasi dalam setiap aktivitas. Sejalan dengan teori (Mangkunegara, 2016), keberhasilan sistem K3 sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan seperti pelatihan, sosialisasi, serta penguatan regulasi internal agar kesadaran tersebut semakin meningkat. Dengan perbaikan sistem K3 secara menyeluruh, diharapkan risiko kerja di lingkungan BPBD dapat diminimalisir lebih lanjut dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman dan berkelanjutan bagi seluruh pegawai.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan K3 di BPBD Kabupaten Bone belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap standar keselamatan kerja. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Bone telah melakukan sejumlah upaya seperti pengajuan penambahan fasilitas, evaluasi kelayakan peralatan serta perencanaan sosialisasi dan pengawasan internal guna meningkatkan implementasi K3 di lingkungan kerjanya. Namun, seluruh upaya tersebut masih memerlukan penguatan dan kesinambungan agar penerapan K3 dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu dari segi waktu. Keterbatasan waktu yang ada, peneliti memaksimalkan proses pengumpulan data melalui wawancara sesuai pedoman yang telah disusun, observasi langsung di kantor BPBD Kabupaten Bone, serta dokumentasi yang relevan selama pelaksanaan penelitian. Keterbatasan waktu ini mengakibatkan peneliti belum dapat menjangkau seluruh bidang secara menyeluruh dan tidak dapat melakukan observasi berulang untuk menggali data yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak ruang untuk disempurnakan, oleh karena itu diharapkan adanya penelitian lanjutan yang dapat memperluas ruang lingkup, misalnya dengan membandingkan penerapan K3 pada BPBD di beberapa kabupaten atau provinsi lain sebagai studi komparatif. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan metode kuantitatif guna memperoleh data yang lebih terukur terkait efektivitas penerapan K3. Selain itu, kajian di masa mendatang dapat diarahkan pada analisis dampak penerapan K3 terhadap kinerja pegawai atau pengembangan strategi implementasi K3 berbasis teknologi, agar dapat menjawab tantangan kerja di era digital dan situasi bencana yang dinamis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian langsung di BPBD Kabupaten Bone. Terima kasih juga atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, F. (2010). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RSUD Tarakan Tahun 2010*.
- Amri, T. T. (n.d.). *Hubungan Antara Faktor Penghambat Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Dengan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Rsud Balung Kabupaten Jember)*.
- Consultant, O. (2024). *PANDUAN KOMPREHENSIF TENTANG 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)*.
<https://www.ohs-consultant.com/2024/08/panduan-komprehensif-tentang-5r-ringkas.html>
- Creswell, W, J. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dewi Kurniasih, Udaya Madjid, Y. A. H. (2024). *Sosiologi Pemerintahan*. Deepublish.
- Haworth, N., & Hughes, S. (2012). The International Labour Organization. In *Handbook of Institutional Approaches to International Business*.
<https://doi.org/10.4337/9781849807692.00014>
- Madjid, U. (2020). *Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Bandung.
- Makhroja, M. (2023). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rsud Dr.R.Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Rsud Dr.R.Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Mangkunegara, A. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muniasari, N. P. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Ergonomi Perkantoran Untuk Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Di Pt Coda Integra Internusa*.
- Shahibah, B. (2012). Penerapan Keselamatan (K3) Terhadap Tenaga Kerja Pembangunan Proyek Double-Double Track Kereta Api Jalur Jatinegara-Manggarai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. *Экономика Региона*, 32.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. 230.
- Smith, R. et al. (2021). *Occupational safety and health management in emergency response organizations: A global perspective*. 76.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.
<http://belajarpisikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suma'mur. (2001). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Gunung Agung.
- Syahrani, M. (2023). *Jumlah Kecelakaan Kerja Indonesia dalam 8 Tahun Terakhir*.
<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-kecelakaan-kerja-indonesia-dalam-8-tahun->

terakhir-sjo5X

Wahdania, N. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Pt. Indonesia Power Pltu Barru (Bru Omu). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Yuliandi, C. D., & Ahman, E. (2019). *enerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang*. 98–109.

